

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada era digital dewasa ini, demokrasi di Indonesia semakin disorot khususnya dalam praktik pelibatan politik warga negara muda. Hart, S. (2009, hal.641–642) menyatakan bahwa kita sedang mengalami krisis kewarganegaraan yang diarahkan pada kaum muda. Fenomena nyata saat ini kita masih berhadapan dengan sikap oportunistis, apatis dan pesimis pada warga negara muda terhadap politik. Dalam hal ini, Bincof, M., & Student (2018, hal. 64) berpendapat jika diberbagai negara, pemahaman, dan persepsi kaum muda dalam partisipasi politik tetap mengecewakan. Oleh sebab itu, orientasi praktik pelibatan politik warga negara muda yang masih berada pada masa transisi perlu di akomodasi agar tetap berada pada situasi yang kondusif pada lajur pelibatan politik.

Artikulasi pelibatan politik warga negara muda berada pada kondisi yang terus bergejolak. Dalam sejarah Indonesia, Jurdi, S. (2012, hal. 30) menjelaskan bahwa peran pemuda dalam politik di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosio kultural yang merupakan manifestasi dari keinginan untuk terbebas dari kolonialisme. Namun, bagaimanapun asumsinya, peran warga negara muda dalam politik tetap menjadi penting sesuai dengan pendapat Marchi, R., & Clark, L. S (2017, hal. 55) yang menyatakan jika ketertarikan pada partisipasi dalam protes pada pemuda, telah berkembang menjadi bidang penelitian substansial sendiri dalam kehidupan sehari-hari anak muda yang kemudian dapat ditransformasikan menjadi keterlibatan sipil. Berdasar pada hal tersebut, dapat dipahami bahwa peta pelibatan politik warga negara muda menjadi pembasisan politik yang selalu menarik untuk dibicarakan karena mereka memiliki posisi yang strategis dalam konstruksi pembangunan baik secara mikro maupun makro.

Tentang warga negara muda, Bung Karno presiden pertama Republik Indonesia mempunyai ungkapan yang masyhur sekaligus penegasan terhadap pentingnya kaum muda dalam perubahan yaitu “Beri Aku 100 Orang Tua Niscaya Akan Kucabut Semeru dari Akarnya, Beri Aku 10 Pemuda Maka Akan Kuguncangkan Dunia”. Demikian ungkapan Pak Soekarno yang mengisyaratkan bahwa pemuda menjadi objek dalam perubahan karena pemuda memiliki integritas

Yayuk Hidayah, 2020

*PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL*

yang tinggi pada perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal ini, Thomas, E., Jennifer, E., & Maher Thomas V. (2017, hal. 279–278) menyatakan jika pemuda berada pada saat yang kritis dalam pengembangan identitas mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan pemuda dalam politik sesuai dengan cara-cara yang menghormati identitas mereka sebagai warga negara muda.

Memasuki era revolusi industri tuduhan terhadap warga negara muda yang kurang tertarik dalam kontes politik ramai dalam kajian perkembangan politik dunia. Di Bangladesh, inisiatif pemerintah untuk melibatkan kaum muda dalam politik adalah melalui pelatihan kepemimpinan (Tamanna, 2018, hal. 85). Sementara di Nigeria, pemerintah setempat mencoba berbagai cara untuk membuat pemuda tertarik pada politik salah satu caranya adalah dengan pendirian *National Orientation Agency* (NOA) yang menyediakan platform *e- polling* yang menarik bagi remaja (Ekwenchi, O., & Udenze, S., 2014, hal. 1–8). Survei tentang sikap anak muda terhadap kehidupan demokratis di Inggris, Prancis, Spanyol, Austria, Finlandia, dan Hungaria menunjukkan bahwa kaum muda bersedia untuk terlibat secara politik tetapi partisipasi mereka terkalahkan oleh praktik politik arus utama yang ada. Banyak di antara anak muda Eropa berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, tetapi keinginan tersebut tidak dipenuhi oleh lembaga dan wacana demokrasi yang ada (Cammaerts, B., Bruter, M., Banaji, S., Harrison, S., & Anstead, N., 2013. hal. 645-664). Berdasarkan pada realitas tersebut menjadi perhatian bersama bahwa gerak pemuda dalam politik membutuhkan pengelolaan potensi sehingga dapat meminimalisasi krisis pelibatan politik yang dituduhkan pada warga negara muda.

Masalah pelibatan pemuda dalam politik masih menjadi tantangan bagi kehidupan demokrasi, perilaku mereka sering kali menimbulkan tanda tanya terhadap perannya sebagai warga negara. Namun demikian Wells, S. D., & Dudash, E. A. (2007, hal. 1280) menegaskan bahwa upaya dalam menginvestigasi politik pada warga negara muda dapat membantu menerangi sikap dan perilaku warga negara muda dalam konteks politik. Berhubungan dengan situasi ini, menjadi evaluasi kemudian terhadap pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yang telah terjadi selama ini. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Staeheli, L. A., & Hammett, D. (2010, hal. 667) bahwa Pendidikan kewarganegaraan digunakan dalam upaya untuk menciptakan masyarakat jenis dan

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)

UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT

WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Adanya kejenuhan dengan tontonan lakon drama politik menjadikan kegamangan bagi warga negara muda akan perannya dalam bingkai politik. Sementara di sisi lain, pola pikir warga negara muda di Indonesia tidak terlepas dari pusaran revolusi industri yang telah menjadikan warga negara muda di Indonesia berbeda dalam hal pola komunikasi, berpikir, dan pola memandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Lakon politik yang mengarah pada moral destruktif menjadikan citra politik buruk bagi warga negara muda. Dalam ruang lingkup kehidupan global, Benedict, K.(2015, hal. 155–161) menyampaikan bahwa konsep tata kelola global menimbulkan dua set masalah yang belum terselesaikan, yaitu berkaitan dengan klaim-klaim pelaksanaan wewenang yang sah, dan nilai-nilai demokratis. Benedict, K.(2015, hal. 155–161) juga menegaskan bahwa tata kelola global yang mencakup kegiatan yang melampaui batas-batas nasional di tingkat internasional, transnasional, dan regional dan didasarkan pada hak dan aturan yang ditegakkan melalui kombinasi insentif ekonomi dan moral mendatangkan persoalan yang mendatangkan perubahan.

Partisipasi politik warga negara merupakan suatu konsekuensi logis dari diberlakukannya sistem demokrasi pada suatu negara. Verba, S. (1967, hal.53–78) menegaskan bahwa partisipasi dalam masyarakat demokrasi adalah suatu “nilai” yang berharga bagi pembuat keputusan. Selaras dengan hal tersebut, hasil penelitian Webb, M. O., Karabayeva, A. G., & Kuntuova, I. M. (2015, hal. 747-772) mengenai konsepsi warga negara tentang demokrasi yang dapat mempengaruhi mereka terlibat dengan sistem politik terutama telah memprediksi bahwa ke tidak puasan memotivasi keterlibatan politik warga negara. Oleh karena itu, mengenai pelaksanaan demokrasi untuk mendukung perkembangan generasi muda kita sebagai warga negara yang berempati maka diperlukan arahan yang sistematis, terkonsep dan terencana dengan baik.

Adanya kecenderungan yang masih sporadis dalam aktivitas partisipasi politik pada warga negara muda, turut menjadikan aktivitas keterlibatan (engagement) dalam bidang politik dari warga negara muda memerlukan pengelolaan yang lebih baik dan navigasi yang jelas. Sejumlah fakta mengenai aktivitas engagement warga negara muda menunjukkan arah yang kurang baik apabila di tinjau dari pemaknaan engagement dalam bidang politik. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Pontes AI, Henn M&Griffiths MD (2019, hal.3-21)

Yayuk Hidayah, 2020

*PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL*

berpendapat jika terdapat penyebab adanya *dis-engagement* dalam bidang politik adalah faktor yang terkait dengan pembentukan, nilai-nilai politik, sikap, dan pola perilaku politik anak muda. Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya perbedaan antara harapan dan realitas politik diantara orang – orang muda. Philippa Collin dalam Kathy Edwards (2015, hal.1470-1472) mengemukakan bahwa *dis-engagement* warga negara muda dalam bidang politik adalah modernitas yang telah membawa perubahan signifikan baik dalam identitas anak muda warga negara muda maupun dalam bagaimana partisipasi politik yang dipraktikkan oleh warga negara muda. Philippa Collin menjadikan contoh aktivitas politik warga negara muda di Australia dan Inggris yang menghasilkan 'masyarakat jaringan' yang semakin menonjol karena aktor kebijakan dan media digital semakin terbuka. Permasalahan mengenai *dis-engagement* warga negara muda dalam bidang politik juga disampaikan oleh Kennelly, J (2011, hal.1-17) bahwa di Kanada, orang-orang muda dan aktif secara politik di Kanada diklasifikasikan sebagai 'warga negara yang baik' ketika mereka menyesuaikan diri dengan status *quoneo* liberal dan tidak melanggar batas-batas perilaku yang dianggap pantas untuk warga muda.

Senada dengan Kennelly J, Amasa, N., & M. Thokozani (2011,hal.127–142) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Afrika Selatan sebagian besar diarahkan untuk menciptakan warga negara yang patuh. Oleh karena itu, sistem politik yang demokratis bukanlah jaminan untuk partisipasi yang bebas dan setara dari warga muda. Kemudian Erdoğan, E & Uyan-Semerci, P. (2017, hal. 57-75) menunjukkan bahwa di Turki partisipasi politik warga negara muda menunjukkan pola yang berbeda jika dibandingkan dengan populasi lainnya disebabkan karena faktor demografis dan status ekonomi yang dapat berperan pada identitas kolektif dalam pembentukan partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Berdasarkan fakta dan permasalahan mengenai *dis-engagement* warga negara muda dalam bidang politik tersebut, maka pada era digital diperlukan model belajar yang dapat mengarahkan pada keterlibatan untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda.

Kerangka model belajar keterlibatan (MBK) dalam memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital dalam mata kuliah wajib umum (MKWU) mengeksplorasi potensi partisipasi politik dan *civic*

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

engagement dalam substansi materi dalam MKWU dengan memanfaatkan sifat politik dalam MKWU. Hasil penelitian Haigh Y, Murcia K & Norris L (2014, hal. 598-616) mengenai Pendidikan kewarganegaraan di Australia menunjukkan bahwa siswa memiliki sedikit pemahaman tentang hubungan antara kewarganegaraan, sosial dan politik. Kemudian Lopes J, Oliveira C, Reed L & Gable R A (2013, hal, 286-289) mengemukakan bahwa lingkungan pendidikan merupakan lingkungan yang paling banyak di habiskan oleh seseorang, Oleh karena itu, lingkungan pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan seseorang di luar ranah akademis.

Masuk dalam konteks Indonesia, meskipun berada dalam masa pandemi Covid 19, namun pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 menunjukkan pada arah kemungkinan akan tetap digelar. Selain itu, berbagai fenomena dan fakta yang melibatkan warga negara muda selama masa pandemi Covid 19 telah menunjukkan adanya partisipasi politik di dalamnya. Ariefana, P (2020, hal. 1) melaporkan bahwa mahasiswa berdemo Mendikbud meminta potong biaya kuliah UKT saat pandemi *Covid-19*. Kemudian aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di 9 Daerah yaitu Semarang pada 7 Oktober 2020, Bandung pada 6 Oktober 2020, Banten 6 Oktober 2020, Surabaya pada 8 Oktober 2020, Makassar pada 8 Oktober 2020, Bekasi pada 7 Oktober 2020, Jakarta pada 8 Oktober 2020, Yogyakarta pada 8 Oktober 2020, Malang pada 8 Oktober 2020 (Shalihah, N.F, 2020, hal. 1). Dalam hal ini maka dapat menjadi pertanyaan kemudian adalah “bagaimana pentingnya partisipasi politik warga negara dalam berbagai situasi dan kondisi?”.

Keterlibatan politik warga negara di masa pandemi *Covid-19* terkristal dalam berbagai bentuk dukungan publik selama masa pandemi. Apabila menggambar pada konsep agensi dan kemampuan Amartya Sen dalam Pham, L., & Kaleja, A. (2020, hal. 154–169) dijelaskan bahwa dalam partisipasi politik terdapat tiga dimensi yaitu disposisi individu, peluang untuk partisipasi, dan proses partisipasi. IDEA (*Institute for democracy and electoral assistance*) menunjukkan bahwa selama 21 Februari 2020 hingga 19 Juli 2020 terdapat 67 negara yang memutuskan menunda pemilu nasional dan subnasional karena pandemi *Covid-19*, 23 negara telah memutuskan menunda pemilu dan referendum nasional, 49 negara dan teritori memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional meskipun ada

dalam bayangan khawatir karena pandemi *Covid-19*, 31 telah menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional, 49 negara yang menggelar pemilu di tengah pandemi. Maka dari itu pentingnya partisipasi politik di masa pandemi *Covid-19* ialah menjadi pilar kesadaran warga negara dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk menangani penyebaran *Covid -19*.

Membicarakan warga negara muda, partisipasi politik, dan masyarakat digital akan muncul beberapa pertanyaan kunci yang mengarah pada ketiganya. Pruitt, L. (2017, hal. 507–513) memberikan beberapa pertanyaan tentang partisipasi politik dan pemuda, yaitu: 1) Pilihan apa yang dimiliki kaum muda untuk melakukan perubahan sosial dan politik? 2) Bisakah politik tradisional eksis di mata anak muda? 3) Dapatkah para pemimpin politik mendengarkan kaum muda? Apakah mereka mendengarkan? 4) Apakah alternatif untuk politik yang mungkin ditempuh atau diusulkan orang muda? 5) Apa prospek dan tantangan mereka masing-masing?

Memasuki altar Indonesia, mengenai peran pemuda terangkum pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang -Undang Tentang Kepemudaan. Dalam Undang – Undang tersebut, berisi penguatan terhadap peluang pada setiap warga negara yang berusia enam belas hingga tiga puluh tahun dalam mengaktualisasikan potensinya untuk pembangunan nasional. Dengan demikian, pemuda memiliki porsi dalam pembangunan nasional tidak terkecuali dalam bidang politik. Berkaitan dengan ikut serta dalam politik, Indeks demokrasi di Indonesia baru-baru ini menunjukkan peningkatan dalam beberapa variabel, berbagai peningkatan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan dinamika indeks tersebut. Secara keseluruhan indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1 Data Indeks Demokrasi di Indonesia Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019, hal. 1). Di unduh pada 10 Mei 2019

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa fakta perkembangan demokrasi di Indonesia di tunjukan dengan pelaksanaan dalam 3 aspek yaitu aspek kebebasan sipil 78,46 %, aspek hak-hak politik 65,79 % dan aspek lembaga demokrasi 75,35 %. Kemudian 3 variabel yaitu variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan 54, 28%, peran DPRD 58,92% dan peran birokrasi pemerintah daerah 55,74%. Berdasarkan fakta tersebut, menjadi perkiraan bahwa masyarakat saat ini menjadi lebih cakap dalam berdemokrasi. Senada dengan hal ini Ullah, M. S. (2013, hal. 271–283) mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak memiliki dampak langsung pada pengambilan keputusan politik tetapi dapat memainkan peran penting dalam beberapa proses pembuatan kebijakan. Menyikapi urgensi keterlibatan warga negara muda dalam politik, Kemudian timbul pertanyaan, apa yang selanjutnya dapat dilakukan untuk menyelamatkan pelibatan politik warga negara muda di Indonesia pada era revolusi industri?

Perubahan sosial akibat revolusi industri menghantarkan masyarakat Indonesia pada agenda perubahan yang terus mendorong ke arah lebih baik. Sehubungan dengan hal ini, Stevenson, N. (1997, hal. 365–388) berpendapat bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi media memiliki implikasi penting

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

untuk pertanyaan kewarganegaraan dan budaya. Sementara di sisi lain, Thomas, C. W. (1969, hal. 17–20) menerangkan jika manusia di era sekarang memiliki banyak kesulitan dalam mencapai tujuan yang diinginkan di tingkat pribadi juga mereka yang sosial. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia dengan adanya keinginan dari elemen bangsa dalam menyatukan Indonesia menjadi perwujudan dalam mengkristalkan semboyan bangsa.

Melekat bagi Indonesia bahwa keanekaragaman menjadi pembeda dari negara lainnya di dunia. Dalam hal ini, Kusumohamidjojo (2000, hal. 27) menegaskan jika Indonesia terdiri dari kelompok etnis, budaya, agama, yang semuanya adalah plural dan heterogen. Kemudian berkaitan dengan heterogen tersebut, Lestari, G. (2015, hal. 7) menambahkan bahwa terdapat kebutuhan yang komprehensif yang berkaitan dengan ciri kebhinekaan masyarakat Indonesia. Menyikapi keanekaragaman masyarakat Indonesia yang kemudian di sandingkan dengan cita-cita yang paripurna dari demokrasi Indonesia, Penting kiranya dalam mengupayakan kehidupan demokrasi yang “apik” di tengah perbedaan masyarakat Indonesia.

Tilaar, H. A. R. (2002, hal. 54–56) dalam bukunya *Perubahan Sosial dan Pendidikan* menyatakan bahwa Indonesia telah mencatat dua peristiwa dalam sejarah reformasi. Pertama masa setelah krisis Indonesia dan adanya keinginan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Kedua Indonesia bertekad mengikuti perubahan dunia dewasa ini. Terdapat banyak fakta yang menandai dinamika pelibatan politik warga negara muda di Indonesia pada era revolusi industri. Sederetan praktik pelibatan politik warga negara muda di Indonesia hadir akhir-akhir ini, Makdori, Y. (2019, hal. 1) menyajikan beberapa fakta tentang praktik pelibatan politik warga negara muda, yaitu berbagai aksi yang terjadi di daerah selama 2019 dalam unjuk rasa yang tidak menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Perubahan UU KPK, undang-undang kontroversial yang telah terjadi di Indonesia yaitu Solo, Bandung, Makasar, Medan, Yogyakarta, Semarang, dan lainnya hingga berbagai respon selama Pandemi Covid - 19 berlangsung di Indonesia dan dunia.

Pusaran revolusi industri perlahan namun pasti mulai menggeser pola pelibatan politik warga negara muda di Indonesia, lebih kentara pola perbedaan ketika memperhatikan aspek Siapa warga negara muda di Indonesia dalam teori

Yayuk Hidayah, 2020

*PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL*

generasi yang berkembang. Berkaitan dengan praktik politik dalam bentuk aksi unjuk rasa yang terjadi berbagai didaerahselama2019sebelumnya. Muncul juga aksi dalam bentuk tagar (#) dalam runtutan aksi tersebut. Dalam hal ini, Haryanti, R. (2019,hal.1) menampilkan kemunculan trading dengan tagar #GejayanMemanggil di *twitter* yang menjadi bagian unjuk rasa yang tidak sepakat terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Perubahan UU KPK, berbagai undang-undang kontroversial. Adanya fenomena pergeseran pola pelibatan politik warga negara muda di Indonesia menjadi bilik baru dalam upaya menyeimbangkan demokrasi di Indonesia.

Pergeseran pelibatan politik warga negara muda di Indonesia menjadi sense of crisis dalam membahas warga negara muda di Indonesia, pelibatan politik, dan demokrasi. Sehubungan dengan hal ini Marchi, R., & Clark, L. S. (2018, hal. 146) menyatakan bahwa konektivitas inter personal yang difasilitasi oleh media sosial dapat menciptakan peluang bagi suara remaja dan identitas kolektif yang menginspirasi tindakan. Karena itu, keikutsertaan warga negara muda dalam praktik politik di Indonesia merupakan perpanjangan fungsi warga negara muda sebagai agen perubahan di Indonesia. Warga negara muda di Indonesia sudah selayaknya tampil dalam proses demokrasi konteks Indonesia demi mendorong perwujudan demokrasi Indonesia yang sehat yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Adanya pelibatan pelibatan politik warga negara muda di Indonesia menjadi penanda terhadap adanya respon dari warga negara muda di Indonesia terhadap kebijakan dari pemerintah. Dalam hal pelibatan, Jacoby, B., & Hollander, E. (2009, hal. 21–30) terlebih dahulu telah mensyariatkan bagi aspek pendidikan untuk memberikan kesempatan agar belajar dan mempraktikkan keterlibatan sipil sehingga para siswa dapat menciptakan identitas kewarganegaraan mereka sendiri yang sesuai dengan diri mereka. Meneruskan gagasan pelibatan (*Engagement*) Jacoby,B.,& Hollander, E.(2009, hal.1) sudah selayaknya pembentukan pelibatan politik warga negara muda di Indonesia mulai diimunitasi. Pelibatan warga negara muda di Indonesia dapat mulai dikembangkan sesuai dengan peran dari warga negara muda di Indonesia. Peran tersebut dapat berupa di lingkungan keluarga, masyarakat, komunitas, organisasi dan lingkungan sosial lainnya yang diperlukan dalam perwujudan pelibatan warga negara muda di Indonesia.

Yayuk Hidayah, 2020

**PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL**

Pengembangan pelibatan (*Engagement*) diupayakan dalam formulasi pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Fonseca, A. (2003, hal. 24–25) menyatakan bahwa *educating for citizenship* adalah upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis, di seluruh sekolah dengan tujuan akhir adalah mempromosikan siswa sebagai warga negara dan mempersiapkan mereka untuk partisipasi aktif dalam masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Figueiredo, C., & Silva, A. (2000, hal. 1974 – 1999) menyatakan jika keterampilan kewarganegaraan diperlukan bagi mereka (warga negara) untuk melakukan perannya sebagai warga negara. Kemudian Bronson, M. S. (1999, hal. 1–8) menyampaikan bahwa dalam kajian ilmu Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dikembangkan adalah *civic knowledge, civic disposition, civic skills*.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan pada bulan Desember 2018 hingga bulan Februari 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentang inisiasi pelibatan warga negara muda di delapan kampus yang berbeda yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atmajaya, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Kristen Duta Wacana, peneliti mendapati beberapa fakta lapangan yang menunjukkan arah pelibatan warga negara muda yaitu:

1. Upaya meneguhkan partisipasi politik warga negara muda, masing-masing kampus memiliki skema yang berbeda yang dikaitkan dengan visi-misi kampus namun tetap dalam satu tujuan yaitu partisipasi politik warga negara muda.
2. Terdapat upaya dalam bentuk pembentukan organisasi kampus baik dalam bentuk himpunan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, lembaga kampus, dan lainnya yang semuanya mempunyai kesamaan yaitu mewadahi mahasiswa dalam pengembangan bakat, minat mahasiswa.
3. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat 1 dan 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyerukan Pendidikan Kewarganegaraan wajib ada dalam setiap satuan pendidikan. Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi diharapkan menjadi media untuk memberikan sentuhan moral kepribadian Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sehingga menjadikan mahasiswa menjadi lebih demokratis, kritis, berkompeten, mencintai tanah air, memahami hak dan

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

kewajiban dan harmonis dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

4. Menuju arah partisipasi politik, mahasiswa mempunyai cara tersendiri dalam menunjukkan eksistensinya dalam partisipasi politik. Partisipasi politik tersebut tergambar melalui keaktifan dalam organisasi kampus, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menjadi bagian dalam konteks kehidupan masyarakat dengan menjadi pengurus organisasi kepemudaan, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan lainnya.
5. Secara khusus melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, para dosen pengampu mempunyai keinginan kuat dalam mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan klasifikasi subjek tersebut yang menjadi mata kuliah pengembangan kepribadian.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan tersebut dapat dipahami bahwa realitas pelibatan politik mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada situasi yang strategis dan dapat bermuara pada reaktualisasi pelibatan politik warga negara muda pada era digital. Perlunya pemahaman hak dan kewajiban warga negara muda sebagai warga negara dalam bidang politik dapat mempertegas posisi warga negara dalam sistem demokrasi yang berjalan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Welzel & Ronald (2008, hal. 126–140) bahwa kini demokrasi semakin menekankan fakta jika pemerintahan oleh rakyat bukan sekadar demokrasi elektoral di mana para elit saja yang bertindak tetapi para warga memiliki pengaruh nyata pada tindakan mereka. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Michiels (2006, hal. 324) bahwa keikutsertaan warga dalam demokrasi dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat fungsi demokrasi saat ini. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka demokrasi yang efektif muncul ketika terdapat pemaksimalan sumber daya dan nilai-nilai pelibatan politik warga negara yang memainkan peran penting dalam keberlangsungan demokrasi.

Pelibatan generasi muda dalam konteks kehidupan bernegara di era revolusi industri yang lekat dengan perkembangan teknologi telah menjadi sorotan dalam perkembangan politik di dunia. Sebagai penyelar, hasil studi empiris Zain (2016, hal. 376–388) yang menguji tingkat keterlibatan sipil di kalangan pemuda Kashmir, Pakistan dari tiga aspek yang berbeda (sensitivitas warga negara, tanggung jawab sipil dan tingkat kolektivisme) menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan sipil di kalangan pemuda Kashmir memiliki potensi besar untuk

Yayuk Hidayah, 2020

*PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL*

peningkatan modal sosial, prasyarat untuk pembangunan sosial, ekonomi dan demokrasi.

Lebih lanjut dalam politik dan teknologi, temuan penelitian di Korea Selatan yang menyelidiki dinamika rumor politik di jejaring sosial online mengungkapkan terdapat keterhubungan antara ketergantungan pengguna sosial media sebagai sumber berita serta kepercayaan mereka pada rumor politik (Bae, 2017, hal. 146). Temuan terhadap studi pada jenis media, edisi online versus offline, dan variabel terkait konten sebagian tersedan dari framing media terhadap berita politik di dua negara Eropa Barat - Austria dan Swiss mengungkapkan bahwa lingkungan online yang sangat kompetitif, jenis-jenis cerita yang diperdebatkan dan isu-isu yang berfokus pada berfungsinya demokrasi memicu penggunaannya dalam berita politik di masa non-pemilu (Schmuck, Heiss, Matthes, Engesser, & Esser, 2016, hal.937–955).

Perkembangan dunia industri telah masuk dalam sendi kehidupan manusia dalam berbagai sektor. Teknologi kini telah menjadi kolaborasi dan modal dalam menjalankan kehidupan manusia, termasuk dalam pelibatan politik. Upaya mengajak generasi muda ke ranah kenegaraan dapat dimulai dengan pembiasaan terhadap fenomena kenegaraan. Studi empiris Ha et al (2016, hal. 718–739.) tentang efek keterlibatan dalam konten berita pada mahasiswa berdasarkan analisis longitudinal 4 tahun pengguna ponsel di Midwest Amerika Serikat menunjukkan penurunan yang stabil dalam minat pada berita politik tetapi tidak pada jenis berita lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka aktivitas yang berkaitan dengan politik pada pemuda patut menjadi perhatian.

Memasuki konteks pembelajaran di Perguruan Tinggi Indonesia, upaya pelibatan generasi muda dalam kehidupan kenegaraan dimulai melalui berbagai inovasi dalam pembelajaran yang dapat mengikutsertakan mahasiswa berposisi sebagai warga negara. Melakukan inovasi dalam proses pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan misi internalisasi pelibatan mahasiswa (*Civic Engagement*) adalah hal yang diselaraskan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Sehubungan dengan hal ini, Wahab & Sapriya (2011b, hal. 24–25) menyampaikan bahwa pendidikan Kewarganegaraan membekali warga negara dengan keterampilan, pengetahuan, nilai yang dapat digunakan dalam perannya sebagai warga negara. Kemudian Winataputra (2008, hal. 18) menegaskan jika

Yayuk Hidayah, 2020

**PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang menghantarkan siswa untuk dapat menjadi individu yang harmonis di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara (1977, hal. 24) menekankan jika pendidikan merupakan usaha dalam memajukan bertumbuhnya budi pekerti seiring dengan usaha dalam memajukan kehidupan. Proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan masih terus diupayakan kesempurnaannya. Meskipun demikian, Ketercapaiannya *Civic Knowledge*, *Civic Skill*, dan *Civic Disposition* hingga menguatkan *Civic Engagement* bagi peserta didik masih banyak mengalami hambatan.

Hasil kajian empiris kepustakaan peneliti menghasilkan bahwa opini mahasiswa tentang pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan kurang menarik bagi mahasiswa, selain itu mahasiswa juga memandang mata kuliah tersebut hanya sebagai formalitas pengambilan mata kuliah wajib umum. Secara lebih terperinci, berdasarkan studi pendahuluan pustaka peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

1. Kurangnya eksplorasi nilai multikultural sebagai esensi pemaknaan demokrasi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan selama ini masih sekedar hanya di kelas sedangkan kondisi di masyarakat adalah paradoks. Isi dari Pendidikan Kewarganegaraan masih terdapat hafalan, semenara di sisi lain Pendidikan Kewarganegaraan berposisi sebagai pendidikan dengan sentuhan nilai-nilai budi luhur warisan bangsa yang seharusnya bukan di hafal melainkan untuk di pahami kemudian dilaksanakan (Zuriah, 2014, hal.1–27);
2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi perlu diupayakan sebagai bagian dari sarana pendidikan bela negara bagi mahasiswa guna mengantisipasi lunturnya semangat bela negara pada mahasiswa (Suabuana, Parhan, Chepy, & Fitria, 2018, hal.34–42);
3. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang dikaitkan dengan kebutuhan pengembangan berpikir kritis mengundang keprihatinan apabila memperhatikan pada pola pembelajaran yang belum divergen (Wahab, 2008, hal. 42). Sementara itu, masih ada juga kesadaran yang belum muncul di kalangan pendidik untuk mengajarkan perkembangan di dunia yang menuntut adanya respon dengan berpikir kritis (Sapriya, 2008, hal.34);

Yayuk Hidayah, 2020

**PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL**

4. Kebutuhan untuk dapat merumuskan capaian tujuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang substansial dan aplikatif sehingga mampu menarik minat mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, misalnya mahasiswa politeknik yang notabene adalah mahasiswa yang berorientasi pada keterampilan praktis (Antoni, 2013, hal.1–8);
5. Terdapat harapan terhadap pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yang berhubungan dengan internalisasi kesadaran hukum sehingga dapat menghasilkan generasi yang sadar hukum ditengah merosotnya kesadaran hukum di masyarakat yang telah mengabaikan nilai-nilai hukum. Dengan demikian terdapat kebutuhan dalam pembaharuan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi agar mahasiswa tidak terjebak dalam nilai-nilai indoktrinasi dan monolitik (Kennedy, 2002, hal. 1–8);
6. Fenomena dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi mahasiswa hanya sekedar datang, duduk, diam dan pulang atau populer dengan istilah D3. Lebih parah lagi terdapat mahasiswa yang tertidur, selain itu mahasiswa dalam proses perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan tidak dipersiapkan dengan baik bahkan catatan pun tidak punya (Saputra, 2015, hal. 1–15);
7. Beberapa kesalah dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pertama, kelas yang terlalu besar sehingga pengajar kurang efektif. Kedua, keterbatasan pengajar yang memenuhi kualifikasi sehingga kurang menguasai ilmunya. Ketiga, perekrutan dosen pengampu mata kurang terprogram. Kelima, kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana. Keenam, model pembelajaran yang masih monoton. Ketujuh, penilaian dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang belum mencapai kompetensi yang ingin dicapai (Winarno, 2013, hal.13–15);
8. Pendidikan Kewarganegaraan dalam ranah kemasyarakatan masih terdapat tidak sadaran pada akar rumput situs Kewarganegaraan, sehingga gerak langkahsitusKewarganegaraankurangoptimal(Kardiman,2014,hal.1–14);
9. Adanya landasan otentik yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sistem pendidikan demokratis (Udin S Winataputra, 2001, hal.3–5);

Yayuk Hidayah, 2020

*PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL*

10. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun demokrasi dan menunjang pembentukan warga negara yang cerdas secara intelektual, emosional dan sosial karena beberapa alasan. Pertama, adanya kecenderungan tidak melek politik. Kedua, meningkatnya *political apathism* (Soenarjo, 2013, hal.1–15).

Berdasarkan beberapa temuan masalah tentang pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan, Soenarjo (2013, hal. 1–20) mengemukakan ada beberapa persoalan yang terjadi selama proses pembelajaran tersebut, yaitu pertama, keberhasilan dalam proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan banyak dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan telah menjadi topik yang luas yang dapat dikaitkan dengan berbagai masalah warga negara baik masalah bela negara, pembentukan negara yang demokratis, nasionalisme, melek politik dan lain-lain. Ketiga, keberhasilan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu diupayakan terutama di negara demokrasi yang baru seperti Indonesia. Berkaitan dengan paradigmatik dalam Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian dalam disertasi ini cenderung mengarah pada domain kurikuler karena menemakan pada praksis Pendidikan Kewarganegaraan dalam ruang lingkup formal. Namun demikian, dalam prosesnya tidak meninggalkan domain akademik dan sosial kultural karena dalam prosesnya menggabungkan berbagai pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan pada domain akademik dan konsep praksis. Selain itu, penelitian juga tidak menanggalkan konsep Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat sesuai dengan formulasi *blue print* pembelajaran melayani (*service learning*).

Kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengalami dinamika dalam hal prinsip, konsep, fokus kajian dan sudut pandang. Kardiman (2014, hal. 126) menjelaskan jika terdapat wacana bahwa Konsep Pendidikan Kewarganegaraan berhenti pada sekolah sebagai lembaga formal. Namun demikian Wahab & Sapriya (2011a, hal. 23–30) menegaskan jika Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang yang *multifacet*. Oleh karena itu, dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, terdapat celah dalam mengisi kekosongan ruang yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Sehubungan dengan hal ini, Licona (2012, hal. 54) menyatakan bahwa pendidikan karakter

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

merupakan kegiatan yang tak pernah berakhir. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, model pembelajaran *Civic Engagement* dengan pola penguatan pelibatan politik yang dapat mendorong keterlibatan mahasiswa dalam demokrasi merupakan irisan domain Pendidikan Kewarganegaraan dari domain akademik, dan sosial kultural.

Penggunaan model pembelajaran dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi upaya dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang sejalur dengan pilar pendidikan milik UNESCO (n.d.) kegiatan pembelajaran dapat diupayakan keberhasilannya apabila dalam pembelajaran tersebut peserta didik mempunyai kesadaran dalam memberikan manfaat pada orang lain. Lebih lanjut dalam ranah kebermanfaatan pembelajaran Barbara Jacoby (2009, hal. 56) menyatakan jika menggunakan *Engagement* dalam proses analisis keberhasilan pembelajaran. Meskipun belum ada pengertian yang ajeg dalam konsep *Civic Engagement*, namun istilah tersebut mengarah pada bentuk keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.

Berdasarkan pengalaman akademik peneliti dalam memulai disertasi ini, peneliti mendapat benang merah dan keterkaitan dalam lajur negara demokrasi yaitu, Pendidikan Kewarganegaraan dan warga negara. Memperhatikan konsep dari *Civic Engagement*, peneliti menyadari bahwa bentuk model pembelajaran *Civic Engagement* menjadi salah satu upaya dalam menunjang pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan guna mewujudkan negara yang berdemokrasi secara sehat yang sejalur dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, formulasi baru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan peran siswa sebagai warga negara dapat terus di inovasikan sehingga menunjang perwujudan warga negara yang demokratis dan ideal. Adanya fakta tentang bentuk baru dari kombinasi teknologi dan demokrasi memberikan cerminan bahwa dalam lingkup kehidupan global kehadiran teknologi tidak dapat ditinggalkan. Berkaitan dengan hal ini, Budimansyah & Suryadi (2008, hal. 2–10) menyatakan bahwa bentuk komunikasi antar bangsa dalam percaturan dunia yang menggunakan teknologi. Kemudian Malihah (2015, hal. 1–9) menyampaikan pada saat usia Republik Indonesia mencapai emas, kehadiran warga negara dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional amat diperlukan. Dengan demikian, menyesuaikan perkembangan teknologi merupakan pilihan terbaik dalam rangka

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

mencapai kehidupan manusia menuju kemaslahatan.

Model pembelajaran keterlibatan yang berciri khas Indonesia dalam memperkuat partisipasi politik dan *Civic Engagement* Indonesia sudah saatnya dikembangkan. Selain bertujuan melakukan inovasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, juga menjadi upaya pengembangan warga negara yang memiliki keterampilan yang memadai dalam kehidupan demokrasi. Senada terhadap cita-cita dalam mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, Darmawan (2009, hal. 1–15) menegaskan bahwa *good and clean government* menjadi dambaan sepanjang zaman. Menyikapi hal ini, maka pengembangan Model pembelajaran *Civic Engagement* yang berciri khas Indonesia menjadi urgent.

Beberapa alasan yang mendasari argumen urgensi model pembelajaran keterlibatan dengan pola penguatan partisipasi politik dan Civic Engagement antaralain. Pertama, Memperhatikan prinsip dasar dalam demokrasi Pancasila yang berkerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kedua, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara seperti paham hukum konstitualisme, supremasi rakyat, pemerintahan perwakilan, pemerintahan presiden sial, pengawasan terhadap pemerintahan. Supremesi rakyat mengandung empat hal dalam mewujudkan kedaulatan rakyat iaitu pertama, rakyat memiliki kehendak untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan dalam Undang -Undang Dasar 1945.

Ketiga, Pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Keempat, Kekuasaan yang berikan oleh rakyat pada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kelima, tidak ada otorida tandingan (Bakry, 2009, hal. 20–25). Keenam, berpijak pada Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/2000 memuat tiga poin yaitu 1) agar mahasiswa mendalami perannya sebagai warga negara, 2) agar mahasiswa dapat memahami persoalan kenegaraan dan mampu menghasilkan solusi masalah kebangsaan dengan berdasarkan nilai luhur bangsa, dan 3) agar siswa mempunyai watak berdasar pada konsep sebagai masyarakat Indonesia.

Ketujuh, terdapat kebutuhan make over kemake up for dalam konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sejarah mencatat bahwa setelah Perang Dunia II, subjek Pendidikan Kewarganegaraan menjadi usaha dalam mempromosikan keterlibatan masyarakat yang sadar dengan perannya dalam kehidupan bernegara. Sehubungan dengan hal ini, Stubblefield (1974, hal. 227–

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

237) menyatakan jika tujuan akhir dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menciptakan opini publik yang mampu menilai secara kritis pencapaian pemerintah dan warga negara yang mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah sosial yang umum.

Kedelapan, sebagai tanggapan dalam menanggapi tantangan pendidikan untuk anak muda dalam konteks demokrasi dan partisipasi sipil yang telah mengalami banyak perubahan pada awal abad ke-21. Hasil studi empiris dari *international civic and citizenship education study* (ICCS) tahun 2009 diketahui bahwa isi dan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan bervariasi di seluruh negara. Namun secara keseluruhan, bahwa isi dan pelaksanaannya menumbuhkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan watak yang mempersiapkan kaum muda untuk memahami dunia, untuk mengamankan pekerjaan yang produktif, dan untuk menjadi warga yang terampil dalam berpartisipasi (International Association for the Evaluation of Educational (IEA), 2013, hal. 35-40).

Blueprint Pengembangan model keterlibatan dengan pola penguatan partisipasi politik dan *Civic Engagement* adalah model pembelajaran layanan (*service learning*). Tentang *service learning* sendiri, Dewey (1954, hal. 23–30) mengemukakan jika pembelajaran layanan (*service learning*) berkembang di Amerika memberikan pemahaman pada siswa mengenai dunia nyata sebagai hasil dari teori perkembangan yang menekankan pentingnya interaksi dengan lingkungan untuk belajar. Dewey menyatakan bahwa, Kurikulum harus memasukkan tindakan dan refleksi sehingga siswa dapat melihat interkoneksi antara apa yang mereka lakukan dan prinsip-prinsip yang memberi informasi. Kemudian, Terry & Bohnenberger (2004, hal. 15–31) mengemukakan bahwa pembelajaran layanan dibedakan dalam tiga tingkat yaitu, layanan masyarakat, eksplorasi komunitas, dan aksi komunitas.

Memahami perbedaan antara layanan kegiatan belajar dapat menjadi faktor penting karena berkaitan dengan keberhasilan pembelajaran (Schine, 1996, hal. 3–9). Dalam disertasi ini, penulis berupaya mengembangkan model belajar keterlibatan dengan pola penguatan partisipasi politik dan *Civic Engagement* yang dapat mendorong keterlibatan mahasiswa dalam demokrasi, khususnya di Indonesia. Model pembelajaran *Engagement* dengan pola penguatan partisipasi

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)

UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT

WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

politik dan *Civic Engagement* akan dapat mengeksplorasi pembelajaran *Engagement* pada mahasiswa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Barbara Jacoby (2009, hal. 67) dalam bukunya “*Civic Engagement in Higher Education: Concepts and Practices 1st Edition*” bahwa keterlibatan warga negara muda dalam Pendidikan Tinggi dapat mengungkapkan kebutuhan mahasiswa untuk dapat berperan sebagai warga negara yang terampil. Partisipasi mahasiswa dalam pengabdian masyarakat meningkat sementara keterlibatan mereka dalam masalah dan proses sipil dan politik telah menurun secara signifikan.

Beberapa rekomendasi tentang pengembangan model pembelajaran keterlibatan dengan pola penguatan partisipasi politik dan *Civic Engagement* adalah pertama, kegiatan keterlibatan masyarakat berfokus pada siswa dan mengambil bentuk pengalaman belajar, KKN, magang, atau proyek layanan masyarakat atau fokus pada kolaborasi fakultas-komunitas untuk penelitian ilmiah dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan, ekonomi, atau layanan sosial. Kedua, pendekatan pembelajaran tersebut saling menguntungkan pada aspek kewarganegaraan dan keterlibatan kemudian dimasukkan ke dalam tujuan lembaga (B. Jacoby & Associates, 1996, hal. 12–17). Ketiga, Villar, Serrat, Celdrán, & Pinazo (2019, hal. 0741713619897589) berpendapat jika pembelajaran yang berfokus pada dua arah (berfokus pada diri sendiri dan pembelajaran yang berfokus) frekuensinya berbeda-beda tergantung pada aktivitas di mana peserta terlibat. Keempat, Model Belajar Melayani (MBM) berbasis nilai sosial spiritual dalam proyek kegiatan mini survei (untuk pemahaman tentang Pancasila), layanan dalam bentuk bimbingan belajar (yang berkaitan dengan pemahaman tentang demokrasi Indonesia dan Wilayah Indonesia), sosialisasi berupa lomba dalam menggambar lingkungan yang bersih, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan bahaya narkoba (Karlioni, 2017, hal. 89). Kelima, Penyadaran masalah antara pemuda dan komunitas untuk mengembangkan hubungan simbiosis mutualisme di mana pemuda dan komunitas bergantung pada nyalain.

Seperti pepatah Afrika kuno yang berisi tentang nasihat dalam menjadikan kehidupan bermakna memerlukan wadah kehidupan (Terry & Bohnenberger, 2004, hal. 15). Pembelajaran layanan menjadi buzz dalam pengaturan akademik yang lebih tinggi. Condon, Grimsley, Knaack, Pitz & Stehr (2015, hal. 1–15) mengemukakan bahwa sebagai dasar, human becoming pembelajaran layanan

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

menjadi fondasi dalam mendiskusikan aspek spesifik dari model belajar-mengajar. Oleh karena itu, potensi menjadikan warga negara yang cerdas melalui skema pembelajaran yang mengembangkan keikutsertaan siswa menjadi awal dalam perwujudan *smart and good citizen*.

Core Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada level Perguruan Tinggi adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Berkaitan dengan hal ini, Jannah (2013, hal. 1–16) mengemukakan bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah yang hidup dalam kemajemukan etnis, agama, bahasa, pakaian, makanan, budaya, tingkat pendidikan, ekonomi, dan pemukiman, pekerjaan yang rentan akan konflik. Lebih jauh dalam menyambut masa depan Indonesia yang emas Malihah (2015, hal. 1 –9) menyatakan jika gagasan pendidikan harus dibubuhi dengan atmosfer global. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam praktik Kewarganegaraan dalam konteks Indonesia sehingga menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya melalui model pembelajaran dalam ranah pendidikan dapat dikaitkan dengan pola pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Dalam hal ini, Driscoll (1994, hal. 8–9) berpendapat jika perubahan yang terus-menerus dalam kinerja manusia merupakan hasil dari interaksi belajar dengan lingkungan. Oleh karena itu, kesesuaian lingkungan belajar dan aktivitas belajar dimungkinkan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Secara khusus dalam hal model pembelajaran, Joyce, Weil, & Emily (2009, hal. 69) menegaskan bahwa model pengajaran sosial sesuai dengan tabiat sosial yaitu mempelajari tingkah laku, interaksi sosial sehingga dapat mempertinggi capaian pembelajaran akademik. Karena itu, dalam subjek Pendidikan kewarganegaraan inovasi model pembelajarannya tidak menanggalkan konsep model pembelajaran pada ilmu sosial tersebut.

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi perlu upaya yang terorganisir guna mewujudkan *nation and character building*. Dalam hal ini, Napitupulu, Panjaitan, & Tambunan (2017, hal. 568) berpendapat jika pembangunan karakter nasional bermuara pada perilaku positif siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengembangan model pembelajaran *civic engagement* dengan pola penguatan demokrasi menggunakan *blueprint* dari pembelajaran layanan (*service learning*), merupakan inovasi dalam proses

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)

UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT

WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak sekedar berorientasi pada pembentukan *civic knowledge* pada mahasiswa, namun juga akan membentuk sikap dan kebiasaan yang akhirnya akan meningkatkan keterlibatan dalam arena demokrasi Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang dapat memaksimalkan ketercapaian *civic skills, civic disposition* pada warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memandang perlu adanya penguatan partisipasi politik dan *Civic Engagement* mahasiswa guna memberikan pandangan terhadap pentingnya aktivitas engagement. Selain itu, kombinasi antara teknologi dan aktivitas keterlibatan memberikan peluang untuk dapat menumbuhkan pelibatan dengan sentuhan digitalisasi yang memunculkan bentuk baru keterlibatan politik pada warga negara. Peneliti meninjau bahwa upaya dalam mengindera pelibatan politik warga negara muda menjadi ikhtiar dalam menjawab pertanyaan “siapa?” yang harus berkontribusi dalam demokrasi yang telah dipertunjukkan selama ribuan tahun dalam demokrasi seperti yang dinyatakan oleh Bullock (2014, hal. 25–26) yaitu peran warga negara umumnya disepakati sebagai unsur penting dari demokrasi yang sehat. Namun, setelah mungkin menyetujui hal ini, pertanyaan mengenai siapa yang harus berpartisipasi dan bagaimana mereka harus melakukannya telah diperdebatkan selama ribuan tahun. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti merasa tergerak untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Pengembangan Model Belajar Keterlibatan (MBK) Untuk Memperkuat Partisipasi Politik Dan *Civic Engagement* Warga Negara Muda Di Era Digital”**

Apa bila ditinjau ulang, Unsur keterbaruan dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada beberapa aspek yaitu pertama, dalam penelitian ini peneliti berupaya mengembangkan model belajar keterlibatan (MBK) dengan menggunakan disain penelitian *research and development* (R&D) berbasis keterlibatan dan menggunakan blueprint pembelajaran service learning serta menggunakan pisau analisa teori *post truth* dan revolusi industri dengan menekankan eksplorasi tentang bagaimana mendefinisikan realitas sosial sehingga mengantarkan pada tindakan yang tepat yang dapat di ambil.

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

Kedua, dalam penelitian ini peneliti berupaya membangun pembelajaran sebagai proses sosial dalam praksis mahasiswa untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* di era digital. Harapannya adalah, dengan menggunakan MBK, akan terbangun struktur pengetahuan yang akan membawahkan mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai fakta, konsep, generalisasi dan teori mengenai partisipasi politik dan *civic engagement*. Sehingga dalam hal ini, penelitian menjadi menarik karena mampu memberikan alternatif cara menyelesaikan permasalahan partisipasi politik dan *civic engagement*.

Ketiga, dalam penelitian ini peneliti berupaya me-redefinisi partisipasi politik dan *civic engagement* khususnya di era digital melalui aktivitas MBK. Artinya, mahasiswa akan mendemonstrasikan pengetahuan serta keterampilan mereka dalam hal partisipasi politik dan *civic engagement* dengan disesuaikan dengan realitas sosial mereka. Hal tersebut kemudian akan mendorong pemakaian yang lebih luas mengenai partisipasi politik dan *civic engagement* di era digital serta mampu menjawab, menyelesaikan permasalahan partisipasi politik dan *civic engagement* dengan tepat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan dalam menginvestigasi pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, peneliti mengumpulkan informasi tentang adanya gap dalam pelaksanaan perkuliahan tersebut dengan pelibatan politik. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya skeptisisme tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dari peserta didik.

Berpijak pada latar belakang yang peneliti sampaikan, peneliti dapat mengenali beberapa persoalan terkait dengan “Pengembangan Model Belajar Keterlibatan (MBK) Untuk Memperkuat Partisipasi Politik Dan *Civic Engagement* Warga Negara Muda Di Era Digital” sehingga melandasi dan relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penggunaan perangkat teknologi dalam proses pelibatan politik memacu masyarakat untuk dapat terlibat secara lebih efisien dan efektif sehingga muncul bentuk baru keterlibatan warga negara dalam demokrasi di era yang digital. Kemudahan akses untuk melakukan keterlibatan politik karena modernisasi

perlu didukung oleh keterampilan politik sehingga tetap berada dalam kaidah yang berlaku dalam masyarakat;

2. Ruang digital memberikan peluang terintegrasinya keterlibatan warga negara dalam demokrasi (Indonesia) melalui skema pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat mengaktifkan keterampilan siswa sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Selain itu, kemudahan berekspresi dalam ruang digital memberikan peluang bagi siswa untuk dapat mengkontektualisasikan pengetahuannya dalam pelibatan politik secara digital;
3. Miskonsepsi urgensi penguatan pelibatan warga negara dalam mendukung eksistensi demokrasi di Indonesia dengan bertumpu pada kondisi kemajemukan
4. Indonesia yang rentan terhadap konflik vertikal maupun horizontal;
5. Absennya inovasi model pembelajaran dalam menanggapi “keluhan” terhadap input, proses dan output pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan kontribusinya terhadap demokrasi di Indonesia;
6. Terdapat peluang dalam menggabungkan domain sosial kultural dan domain akademik sehingga memperkaya domain kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan dan mencapai tujuan perkuliahan sebagai kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah, selanjutnya peneliti mengajukan rumusan masalah berkaitan dengan penelitian, yaitu: “Bagaimanakah pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital?”. Selanjutnya, peneliti membagi rumusan masalah tersebut dalam sub rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran partisipasi politik mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini?
2. Bagaimana pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital?

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

3. Bagaimanakah efektivitas implementasi model pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital. Peneliti berharap hasil penelitian berguna bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan pelibatan politik warga negara muda melalui model *Civic Engagement*.

1.4.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menkaji dan menganalisis gambaran partisipasi politik mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berlangsung selama ini yang terdiri dari:
 - a. Mengetahui keadaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah diterapkan selama ini;
 - b. Mengetahui gambaran pelibatan politik mahasiswa yang telah berlangsung selama ini;
 - c. Mengetahui motivasi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah berlangsung selama ini;
2. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital yang terdiri dari:
 - a. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital;
 - b. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi desain evaluasi model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital;

- c. Mengetahui dan menganalisis efektivitas implementasi model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital;
3. Mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital yang terdiri dari:
 - a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital;
 - b. Mengetahui dan menganalisis evaluasi penerapan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital;

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berlandaskan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis dan teoritis yang dapat peneliti jabarkan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Dari Segi Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ekspansi Pendidikan kewarganegaraan yang berhubungan terhadap:

- 1) bangunan konseptual model kompetensi warga negara dalam membentuk keterlibatan warga di era digital;
 - 2) kerangka teoritik model kompetensi kewarganegaraan warga negara muda;
 - 3) kerangka teoritik konseptual model kompetensi warga negara di era digital.
- Selain itu, penelitian ini juga berguna secara teoritis agar dapat menyuburkan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam domain kurikuler.

1.5.2. Dari Segi Kebijakan

- a. Memberikan gambaran dan pemaparan dalam bentuk fakta yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai analisis dalam pengambilan kebijakan pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dan mengikutsertakan masyarakat.
- b. Memberikan solusi serta upaya untuk memperkuat penguatan demokrasi melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun pelibatan politik kewarganegaraan Indonesia.
- c. Memberikan gambaran dan informasi tentang penguatan demokrasi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai usaha untuk membangun partisipasi pelibatan politik kewarganegaraan Indonesia.

1.5.3. Dari Segi Praktik

Selain memiliki kegunaan secara teoritis, selanjutnya peneliti berharap bahwa penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis, yaitu berguna bagi:

- a. Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun pelibatan partisipasi politik mahasiswa.
- b. Akademisi dan praktisi Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini dapat berguna sebagai blueprint pengembangan penelitian selanjutnya.
- c. Masyarakat, penelitian ini dapat berguna sebagai kontribusi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem demokrasi.

1.5.4. Dari Segi Aksi Sosial

- a. Membantu para mahasiswa untuk memahami pentingnya partisipasi pelibatan politik kewarganegaraan Indonesia
- b. Memberikan informasi pada mahasiswa sehingga dapat menjadi kompas dalam pelibatan pelibatan politik kewarganegaraan Indonesia

1.6. Asumsi Dan Hipotesis Penelitian

1.6.1. Asumsi Penelitian

- a. Model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan berdasar pada gagasan filosofi tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, digunakan tiga cara pandang terhadap Pancasila, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara dan sebagai pandangan hidup. Model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *online civic engagement* keindonesiaan memiliki tujuan yaitu :1) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan dan sikapnya tentang demokrasi dengan berbasis pada nilai-nilai demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila) 2) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan dan sikapnya dalam pelibatan politik dengan dengan berbasis pada nilai-nilai demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila)
- b. Pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, mengenal revolusi industri yang semakin pesat dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia dalam bidang budaya, pendidikan, ekonomi, politik, sosial. Selain itu, dalam sejarah Indonesia, pelibatan politik warga negara muda menjadi garda terdepan dalam meningkatkan martabat Bangsa Indonesia dan menjadi penyalur aspirasi rakyat Indonesia. Misalnya pendirian Budi Utomo, Reformasi 1998, Aksi Malari 1974, Unjuk rasa menolak kenaikan BBM Tahun 2013, dan Tahun 2019 yang disebut dengan tahunnya aksi massa dalam agenda penolakan sederet Rancangan Undang -Undang kontroversial.
- c. *Blueprint* pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital adalah *Service Learning* yang dilakukan dengan empat aktivitas pembelajaran Pertama: *Placement Model* yaitu mahasiswa ditempatkan

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

pada suatu masalah sebagai masyarakat di lokasi tertentu. Kedua: *Presentation Model* yaitu mahasiswa membuat kelompok kecil kemudian mempresentasikan terkait permasalahan tersebut. Ketiga: *Product Model* yaitu mahasiswa menyajikan produk mereka berdasar pada aktivitas Service Learning yang telah mereka laksanakan Keempat: *Project Model* yaitu mahasiswa dan masyarakat berupaya melaksanakan proyek yang telah terintegrasi dalam materi perkuliahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- d. Penggunaan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *online civic engagement* keindonesiaan dapat meningkatkan literasi demokrasi Indonesia (Pancasila) dan pelibatan politik warga negara muda Indonesia.

1.6.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, dan asumsi penelitian, hipotesis penelitian ini adalah:

- a. Terdapat pengaruh yang positif dalam pengimplementasian model belajar keterlibatan (MBK) dalam memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital
- b. Tidak terdapat pengaruh yang positif dalam pengimplemtasian model belajar keterlibatan (MBK) dalam memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital

1.7. Definisi Operasional Variabel

Dalam judul pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital, terdapat empat kata yang peneliti jelaskan dalam penelitian ini, yaitu :1) pengembangan model, 2) *Civic Engagement*, 3) model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement*, 4) partisipasi politik.

1.7.1. Pengembangan Model

Pada bagian pengembangan model, terdapat dua istilah kata yang perlu peneliti jelaskan yaitu pengembangan dan model. Secara singkat, peneliti dapat

menjelaskan bahwa model adalah bangunan ideal yang berguna sebagai acuan dalam suatu tindakan. Sementara pengembangan adalah proses menuju penyempurnaan dalam rangka peningkatan kualitas hasil. Pendefinisian pengembangan model dalam hal ini merupakan bangunan konseptual yang berguna sebagai pedoman untuk memperbaiki hasil pembelajaran *civic engagement* dan partisipasi politik.

1.7.2. *Civic Engagement*

Interpretasi terma *civic engagement* dalam berbagai literatur bervariasi, selain itu belum ada pendefinisian yang ajeg tentang istilah tersebut yang disepakati oleh akademisi dan praktisi *civic engagement*. Sehubungan dengan kondisi ini, peneliti berupaya menelusuri pemaknaan Civic Engagement dengan membawanya dalam konteks Indonesia. Barbara Jacoby (2009, hal. 5–25) menggunakan istilah *Civic Engagement* sebagai konsep tindakan yang di didasari oleh tanggung jawab terhadap dampaknya secara luas, kemudian dalam kehidupan demokrasi dapat digunakan untuk mendukung penciptaan kehidupan pemerintahan yang sehat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. *Civic Engagement* mengkombinasikan pengetahuan, keterampilan, kontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara luas. Dalam buku *Civic Engagement in Higher Education: Concepts and Practices 1st Edition* Barbara Jacoby(2009, hal. 5–25) menjelaskan bahwa terdapat seperangkat keterampilan bagi siswa dalam menghantarkan mereka untuk dapat menjadi intelektual yang dapat bermanfaat dalam praktik kewarganegaraan. Lebih lanjut dalam buku tersebut Barbara Jacoby menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Pendidikan Tinggi mengandung kontribusi dari para pendidik, peneliti, dan pemimpin terkemuka yang menyajikan beragam ide, contoh kasus, metode, dan strategi yang telah terbukti untuk mendidik siswa saat ini untuk dapat agar pribadi yang dapat terampil dan bermanfaat pada masa depan mereka.

Sebagian menggunakan *Civic Engagement* untuk menjelaskan keterlibatan (Herd & Meyer, 2002, hal. 665–688). Keterlibatan masyarakat (*Civic Engagement*) mengacu pada cara-cara di mana warga negara berkontribusi terhadap lingkungan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemudian Adler & Goggin(2005, hal. 236–253) menerangkan jika istilah ini (*civic*

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

engagement) telah digunakan sampai saat ini terutama dalam konteks orang muda. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, sebuah gerakan baru telah muncul untuk mempromosikan keterlibatan sipil. Berkaitan dengan hal ini, Perez, Espinoza, Ramos, Coronado, & Cortes (2010, hal. 245–265) mengemukakan bahwa *Engagement* dimaknai sebagai keterlibatan sipil didefinisikan sebagai menyediakan layanan sosial, aktivisme, bimbingan belajar, dan pekerjaan fungsionaris.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa *Civic Engagement* adalah wujud keterlibatan dalam konteks masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Penekanan *Civic Engagement* adalah pengalaman yang positif dan lingkungan yang mendukung aktivitas keterlibatan. Fenomena *Civic Engagement* menjadi panduan yang komprehensif dalam mengembangkan pengalaman keterlibatan sipil yang berkualitas. *Civic Engagement* adalah keterlibatan masyarakat individu atau kelompok yang membahas masalah yang menjadi perhatian publik dalam ruang publik. Barbara Jacoby (2019, hal. 25–27) mendeskripsikan bahwa dalam literatur tentang keterlibatan sipil dalam Pendidikan Tinggi kaya dengan contoh kursus dan program yang mempromosikan pengembangan siswa sebagai warga negara yang terlibat dalam demokrasi. Secara lebih luas, *Civic Engagement* hadir dalam aksi politik dan nonpolitik. Tujuan dari *Civic Engagement* adalah untuk mengatasi permasalahan publik kemudian mempromosikan keterlibatan masyarakat.

1.7.3. Model Belajar Keterlibatan (MBK) Untuk Memperkuat Partisipasi Politik Dan *Civic Engagement*

Gagasan pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital berdasar pada nilai-nilai demokrasi Indonesia (Pancasila) dan keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Alasan mengapa diperlukan pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) adalah diimunisasi dan merefleksi John Dewey (2004, hal. 35–43) dalam yang menegaskan ada tiga esensi dalam pendidikan demokrasi yaitu, 1) pendidikan demokrasi adalah mengaitkan siswa dengan lingkungannya, 2) pendidikan demokrasi berfokus pada pemecahan

masalah berdasarkan disiplin akademik dan 3) pendidikan demokrasi melibatkan siswa dan jajarannya (fakultas, kampus dan lainnya) secara kolaboratif.

Proses pendidikan memiliki berbagai dimensi keterlibatan dan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap hasil pendidikan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara (1946, hal. 24) tentang tri pusat pendidikan yaitu keluarga, lingkungan dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdapat 3 yaitu formal, non formal dan informal (Republik Indonesia, 2003, hal. 1). Oleh karena itu, lingkungan pendidikan perlu dibangun dengan cara tertentu yang dapat mensinergikan antara pengaturan pedagogik, pengetahuan dan keterampilan bagisiswa.

Beberapa hasil kajian empirik yang menjadi dasar dalam penelitian pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* antara lain, pertama, penelitian Li (2020, hal.292–295) yang menjelaskan bagaimana kebijakan tentang pemuda nasional dibangun di Denmark dan bagaimana keterlibatan pemuda dioperasionalkan. Dengan menggunakan 11 indikator dari Forum Pemuda Eropa, bergerak mengidentifikasi fitur-fitur kebijakan pemuda di tingkat nasional yang mewakili tiga mekanisme khas dari keterlibatan sipil kaum muda. Berdasarkan hasil wawancara semi-konstruksi mendalam dengan pejabat terkait pemuda, penelitian tersebut mengungkapkan struktur yang berbeda dan tantangan pragmatis yang berbeda di setiap kota. Selanjutnya, penelitian Chan (2018, hal. 1048–1054) yang menguji hubungan antara keterhubungan multimodal (mis. Berkomunikasi dengan orang lain melalui berbagai saluran digital) dan kesejahteraan subjektif, menunjukkan kegunaan dari perspektif umur dalam memahami efek dari teknologi komunikasi di masyarakat. Penelitian lainnya yaitu Adha, Budimansyah, Kartadinata & Sundawa (2019, hal. 467–483) menghasilkan bahwa dalam menunjang integrasi sosial, aktivitas generasi muda tidak terpisahkan dari kehadiran teknologi.

Menanggapi fakta akademik tersebut, maka perlu di bangun sudut pandang warga negara muda dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Dalam pandangan Yunus (2016, hal. 156), konsep demokrasi Pancasila merupakan penggalan dari nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat Indonesia. oleh karena itu, demokrasi Pancasila menjadi alternatif dalam kondisi

Yayuk Hidayah, 2020

**PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL**

masyarakat Indonesia yang multikultural. Selain itu, untuk menjaga eksistensi konsep demokrasi, maka pelibatan politik warga negara muda menjadi unsur penting dalam menyelaraskan antara *das sollen* dan *das sein* praktik demokrasi di Indonesia.

Menjawab pertanyaan selanjutnya, mengapa dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ? Hal tersebut berdasar pada Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, yang kemudian diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Sesuai dengan SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006, materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 8 (delapan), yaitu : 1) filsafat pancasila, 2) identitas nasional, 3) hak dan kewajiban warga negara, 4) negara dan konstitusi, 5) demokrasi indonesia, 6) hak asasi manusia dan rule of law, 7) geo politik indonesia dan 8) geo strategi indonesia.

1.7.4. Partisipasi Politik

Almond (1990, hal. 24–30) menyampaikan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam politik senada dengan tujuannya dalam mempengaruhi keputusan publik. Berkaitan dengan pendapat tersebut, dalam konteks Indonesia babak baru pola penyelenggaraan pemilihan umum memasuki cara baru sejak Juni 2005. Melalui Undang -Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini, pelibatan politik menjadi representasi dalam menyelenggarakan tata kelola negara, sehingga keterlibatan warga negara menjadi dalih dalam penegakan kesetaraan dalam bidang politik.

Hasil kajian empirik menjadi dasar dalam urgensi pelibatan politik antara lain, 1) Azis,Pawito,&Setyawan(2020,hal.1–13) berfokus pada kelompok etnis Tionghoa di kota Singkawang menemukan bahwa penggunaan media sosial bukan pendorong utama untuk peningkatan keterlibatan politik online anak muda Tionghoa di kota Singkawang, tetapi media sosial memberikan kesempatan bagi orang muda Tionghoa di kota Singkawang untuk mengakses informasi dan transfer pengetahuan politik. 2) penelitian Liu, Modrek, & Sieverding (2019, hal. 112602)

Yayuk Hidayah, 2020

*PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL*

mengenai efek paparan protes politik terhadap akumulasi modal manusia dan kesejahteraan pemuda yang dialami di Mesir dari tahun 2011 hingga 2014, menghasilkan bahwa paparan terhadap protes meningkatkan persepsi tidak pastian tentang masa depan. 3) Kajian empiris Attar-Schwartz & Ben-Arieh (2012, hal. 704–712) yang menyoroiti sikap politik dan nilai-nilai kesadaran terhadap 1753 remaja Israel-Yahudi dan Israel-Palestina berusia 15 hingga 17 tahun. Hasil studi empiris tersebut menunjukkan bahwa remaja Palestina melaporkan lebih percaya pada sistem politik, lebih sadar dan memiliki pendapat tentang sistem politik daripada rekan-rekan Yahudi mereka. Selain itu, ditemukan bahwa lebih banyak remaja religius menunjukkan lebih banyak kesadaran dan keterlibatan politik. Para peneliti menyarankan bahwa beberapa temuan tersebut dapat menjadi temuan yang potensial dalam hal kegiatan politik oleh remaja minoritas.

1.8. Struktur Organisasi Disertasi

Untuk memudahkan penulisan disertasi, peneliti menyusun sistematika penulisan disertasi sebagai berikut:

Bab 1 adalah pendahuluan yang akan diuraikan beberapa sub bab antara lain sebagai berikut: Latar belakang penelitian : Latar belakang penelitian yaitu tentang gambaran permasalahan pelibatan politik dan pentingnya penegakan nilai-nilai demokrasi Indonesia (Pancasila) dalam praktek kehidupan bernegara. Dalam latar belakang penelitian ini juga, peneliti menggambarkan penyelesaian masalah tersebut dengan pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital.

Rumusan masalah penelitian: Berisi penjelasan rinci permasalahan yang akan diteliti yang meliputi urgensi pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital yang meliputi, 1) gambaran pelaksanaan mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan yang telah terjadi. 2) bagaimana efektifitas pelaksanaan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital dan 3) evaluasi penerapan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

dan *civic engagement* warga negara muda di era digital dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan dari penelitian : yaitu tentang tujuan umum dan tujuan khusus penelitian disertasi berdasarkan dengan indikator dan rumusan masalah.

Manfaat penelitian: Berisi penggambaran manfaat penelitian yang diperoleh secara teoritis, kebijakan, praktik , aksi sosial dalam pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan. Struktur Organisasi Disertasi: berisi sistematika penulisan disertasi secara utumulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode penelitian, Bab IV Temuan dan pembahasan, Bab V Simpulan, Implikasi dan rekomendasi. Bab 2 berisikan kajian pustaka. Pada bagian ini berisikan penjelasan tentang a) aktualisasi pelibatan politik dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari 1) nilai-nilai pelibatan politik, 2) aktualisasi pelibatan politik warga negara muda di era digital, 2) warga negara muda, 4) demokrasi di era digital. b) filosofi pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) di era digital, c) teori yang melandasi pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) di era digital, 1) *service learning*, 2) *kontekstual teaching learning*, 3) revolusi industri, 4) post-truth. d) konsep pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) di era digital, e) teori dan konsep partisipasi politik era digital yang terdiri dari 1) *civic engagement*, 2) *online engagement* dan pelibatan politik online , 3) keterlibatan siswa, 4) model kompetensi warga negara di era digital , 5) pelibatan politik (*political engagement*) warga negara muda. f) keterkaitan model belajar keterlibatan(MBK) di era digital dalam MKWU Pendidikan Kewarganegaraan. g) hasil penelitian yang relevan. h) kerangka pemikiran

Bab 3: Adalah penjelasan metodologis. Diawali dengan penggambaran bagaimana penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang jelas, desain atau prosedur dalam penelitian, lokasi dan sampel penelitian dengan berdasar pada rujukan teori dalam penelitian, instrumen dan teknik penelitian, serta analisis data yang sesuai dengan data penelitian dalam disertasi ini. Bab 4: Pada bab 4 secara keseluruhan mencakup 2 poin yaitu hasil dan pembahasan. Bagian hasil terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian. Pada bagian pembahasan terdiri dari efektivitas model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

digital yang terdiri dari: gambaran kerangka model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital yang diimplementasikan di kelas, hasil penilaian kemampuan dosen dalam mengimplementasikan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital, hasil penilaian mahasiswa terhadap model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital, dampak model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital terhadap kelas eksperimen dan kontrol. Berikut peneliti sajikan gambaran pada BAB 4 yaitu:

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Hasil studi pendahuluan gambaran pelibatan politik mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hasil Tahap Pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital.
 - a. Tahap penyusunan draft model pembelajaran.
 - b. Tahap pengembangan model pembelajaran.
 - c. Tahap uji coba pengembangan model pembelajaran.
 - d. Tahap uji coba model terbatas kopesempit di Universitas Ahmad Dahlan.
 - e. Tahap uji coba model skope luas di Universitas Negeri Yogyakarta.
 - f. Bentuk akhir model pembelajaran.
 - g. Sistem sosial model pembelajaran.
 - h. Prinsip pengelolaan kelas model pembelajaran.
 - i. Dampak instruksional dan pengiring model pembelajaran.
 - j. Kompetensi pelibatan politik mahasiswa dari hasil uji coba pengembangan model.
 - k. Hasil tahap pengujian model.

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

- l. Hasil persepsi dan sikap mahasiswa terhadap penerapan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital.
 - m. Hasil persepsi dan sikap mahasiswa terhadap efektivitas model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat pelibatan politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital.
3. Efektivitas model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital
 - a. gambaran kerangka model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital yang diimplementasikan dikelas;
 - b. hasil penilaian kemampuan dosen dalam model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital;
 - c. hasil penilaian mahasiswa terhadap model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *online civic engagement* ke Indonesia;
 - d. dampak model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *online civic engagement* ke Indonesia terhadap kelas eksperimen dan kontrol;
- C. Pembahasan Penelitian
1. Gambaran pelibatan politik mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Tahap Pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital.
 3. Efektivitas model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital.
 4. Bab 5: Adalah bagian akhir disertasi. Membahas mengenai kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Kesimpulan adalah jawaban atas

Yayuk Hidayah, 2020

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK)
UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT
WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL

pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Kesimpulan adalah gambaran keseluruhan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan sebagai pijakan untuk implikasi dan rekomendasi. Sebagai penutup dari bab ini dikemukakan dalil-dalil sebagai bagian pandangan ilmu pengetahuan lain.